

Inovasi Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Makassar

Nur Hikmah^{1*}, Mappamiring², Nasrulhaq³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine, how the Application of Electronic Parking Terminal System Innovations Seen From the Innovation Attributes. This research used a qualitative descriptive method, which was to provide an overview or explanation of the application of the innovative electronic parking terminal system (TPE) in the city of Makassar, with a total of 6 informants. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. While data analysis used data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study showed that PD. Parkir Makassar Raya had implemented the Parking Terminal System (TPE) program in Makassar City but it had not been maximized. This was due to the fact that there were still people who disagree and the lack of socialization conducted regarding the Electronic Parking Terminal System (TPE) to the public.

Keywords : *innovation, electronic parking terminal system, makassar city*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana Penerapan Inovasi Sistem Terminal Parkir Elektronik Dilihat Dari Atribut Inovasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang penerapan inovasi sistem terminal parkir elektronik (TPE) di kota makassar, dengan jumlah informan 6 orang. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD. Parkir Makassar Raya telah melaksanakan penerapan program Sistem Terminal Parkir (TPE) di Kota Makassar tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang kurang setuju dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) ke masyarakat.

Kata Kunci: *inovasi, sistem terminal parkir elektronik, kota makassar*

* nurhikmah@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan yang selalu membawa tuntutan yang semakin lebih bagus, demikian juga tuntutan perubahan oleh masyarakat yang semakin modern kepada para aparatur pemerintah mengenai pelayanan publik. Keluhan masyarakat terhadap kurangnya kualitas pelayanan yang merupakan salah satu faktor menunjukkan belum memadainya pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara.

Makassar menuju kota dunia maka terdapat ada 3 inovasi yang telah digunakan oleh pemerintah kota makassar terkait kemudahan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan perpajakan, inovasi yang pertama yaitu Sistem Parkir Nontunai pada tahun 2017 yang menggunakan alat mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dan kartu pembayaran, dan semua alat disediakan oleh Bank BRI, yang kedua yaitu *Smart Parking Online* pada tahun 2018 yang menggunakan *Smartphone* dan print dengan cara kerja ketika kendaraan masuk di area perpajakan maka akan difoto oleh jukir dan langsung keluaran struk, dan yang ketiga yaitu Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) pada tahun 2019 yang menggunakan alat mesin yang seperti ATM yang dipasang di pinggir jalan

atau di bahu jalan dan Menggunakan UNIK (Uang Elektronik) ketika ingin membayar.

Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) di kota Makassar sudah mulai berjalan sejak tahun 2019. Konsep Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) ini merupakan sistem perpajakan elektronik untuk mewujudkan program. Program Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) merupakan program besar dalam peningkatan pelayanan publik yang lebih modern dan mendorong pendapatan asli daerah (PAD) melalui PD Parkir Makassar Raya. Dengan penerapan program ini maka akuntabilitas parkir sehingga bisa mengurangi adanya bias terkontrol dengan baik dan peningkatan pelayanan. Sistem terminal parkir elektronik (TPE) juga sangat menguntungkan dan mensejahterakan para juru parkir lantaran mereka mendapat gaji bulanan dan jaminan dari BPJS Kesehatan, untuk menghindari terjadinya pungutan liar oleh juru parkir, dan peningkatan pelayanan.

Kerja Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) yaitu Para pengendara memarkir kendaraannya seperti biasa di pinggir jalan. Pengendara mendatangi mesin mesin TPE untuk memasukkan nomor pelat kendaraan, jenis kendaraan, dan waktu mulai

parkir. Saat akan meninggalkan lokasi parkir, pengendara kembali mendatangi mesin TPE untuk memasukkan data waktu meninggalkan lokasi. Pembayaran Sistem Terminal Parkir Eletronik (TPE) akan menggunakan kartu, menyerupai kartu uang elektronik (Unik), kartu tersebut ditempel pada mesin terminal parkir elektronik yang menyerupai seperti mesin ATM yang dipasang di titik parkir yang ditentukan dan penerapan metode pembayaran berupa non tunai bertujuan agar pembayaran langsung masuk ke penerima pungutan liar, Struk parkir akan keluar dari mesin setelah itu.

Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik memandang publik sebagai target pelayanan sehingga diharapkan mampu memberikan dedikasi terbaik dalam melayani publik yang lebih edukatif, dan selektif serta mengelola kebijakan publik yang dijalankan oleh birokrasi publik, oleh karenanya reformasi publik menghajatkan peningkatan kinerja diantaranya pelayanan publik, melalui berbagai cara (berinovasi) dengan tujuan akuntabilitas efektifitas dan efisien

Pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan

segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Sinambela (2010:3) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Moenir (2006:16-17) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Sependapat dengan itu. Pasolong (2007:4) mengatakan bahwa pelayanan didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Syafiie (2003) pelayanan terdiri dari 3 unsur pokok yaitu: (a) Biaya relatif yang lebih rendah, (b) Waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan (c) Mutu yang diberikan relatif bagus. Dalam konteks pelayanan publik adalah mempermudah urusan publik, mempercepat waktu pelaksanaan urusan publik, memberikan kepuasan kepada publik, dan mendahulukan kepentingan umum. Senada dengan itu, menurut Widodo, (2001) pelayanan

publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat atau orang yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan cara yang telah disepakati atau ditetapkan.

Inovasi Pelayanan Publik

Definisi dari inovasi itu sendiri menurut West & Far dalam Ancok (2012:34) adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan produser yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas.

Dalam mengukur tingkat inovasi, Muluk (2008:48) mengatakan inovasi juga dapat dibedakan dalam dua kategori yakni inovasi terusan dan inovasi terputus: (a) Inovasi terusan merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang berjalan atau produk yang sudah ada, (b) Inovasi terputus merupakan suatu proses inovasi yang membawa perubahan yang sama sekali sangat baru dan tidak lagi berdasarkan pada kondisi yang sudah ada

Inovasi dalam pelaksanaannya memiliki atribut didalamnya. Menurut

Rogers dalam Suwarno (2008:16-18) atribut inovasi antara lain sebagai berikut: (a) Keuntungan Relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sebuah inovasi harus mempunyai kelebihan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang ada sebelumnya, (b) Kesesuaian ialah tingkat kemiripan inovasi dengan nilai, pengalaman yang lalu, dan kebutuhan untuk penerima. Hal tersebut dimaksud agar inovasi yang sebelumnya atau yang lama tidak langsung dibuang begitu saja selain karena alasan faktor biaya yang sedikit namun juga inovasi yang sebelumnya atau yang lama menjadi bagian dari proses perpindahan ke inovasi baru, (c) Kerumitan adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima, dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih besar dibandingkan dengan inovasi sebelumnya, namun, karena sebuah inovasi yang menawarkan cara yang lebih baik dan lebih baru maka tingkat kerumitan ini pada dasarnya tidak menjadi suatu masalah yang penting, (d) Kemungkinan Dicoba adalah dimana suatu inovasi dapat dicoba atau oleh penerima. Inovasi dapat diterima apabila teruji, telah terbukti dan mempunyai keuntungan atau nilai

lebih dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya atau lama sehingga sebuah produk inovasi harus melewati tahap uji publik terlebih dahulu agar dimana setiap pihak atau orang mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi, (e) Kemudahan Diamati adalah mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi.

Menurut Stephen Robbins Inovasi dalam Saenab (2017) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Memiliki kekhasan, yaitu inovasi memiliki ciri khas dalam arti sistem, program tatanan, dan termasuk hasil yang telah diinginkan, (b) Memiliki ciri atau unsur terbaru, (c) Program inovasi dilakukan dengan melalui program yang telah terencana agar smuannya sesuai dengan proses yang tidak tergesa-gesa, (d) Inovasi yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki arah yang ingin dicapai.

Faktor Penunjang Inovasi Menurut Rogers dalam Suwarno (2008) Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti: (a) Adanya keinginan untuk merubah diri, dari yang tidak bisa menjadi bisa dan dari yang tidak tahu menjadi tahu, (b) Adanya kebebasan untuk berpendapat, (c) Adanya pembimbingan yang

berwawasan luas dan kreatif, (d) Tersedianya sarana dan prasarana. Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan.

Dalam mengkaji inovasi, terdapat level inovasi yang menggambarkan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang sedang berlangsung. Menurut Muluk (2008:46) mengatakan kategori tingkat terdiri yaitu: (a) Inovasi incremental berarti inovasi yang terjadi membawa perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Pada umumnya sebagian besar inovasi berada pada level ini dan sangat jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian, (b) Inovasi radikal merupakan suatu perubahan yang mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian dan pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali dilakukan karena membutuhkan dukungan politik yang sangat besar karena umumnya memiliki resiko yang lebih besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan, (c) Inovasi transformative

atau sistemis membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja dan kerorganisasian dengan menransformasi semua sektor, dan secara dramatis mengubah keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan social, budaya dan organisasi.

Electronic Government (e-Gov)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and communication Technology, ICT*) telah membawa pengaruh yang besar terutama bagi organisasi pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi ini telah memaksa organisasi pemerintah untuk melakukan transformasi besar-besaran agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya dalam produk layanan, tetapi juga pada struktur dan manajemen organisasi.

Di Negara-negara maju, *e-Gover* merupakan hasil transformasi mekanisme interaksi birokrasi dengan masyarakat yang menjadi lebih bersahabat. Demikian halnya di Negara berkembang, banyak pengambil kebijakan yakin bahwa pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan

transparan dapat diwujudkan melalui *e-government*. Secara konseptual, konsep dasar dari *e-Government* sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (*e-service*), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer, serta multimedia. Melalui pengembangan *e-Gov* ini, maka sejalan dengan itu dilakukan pula penataan system manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Forman dalam Holle (2011) memberikan defenisi *e-government* secara lebih spesifik lagi yakni penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian layanan.

Pengertian lain disampaikan oleh Hartono (2010) *e-government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan *ICT (Information, Communication and Technology)* sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga pemerintah serta sifatnya.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah ujian proposal. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PD. Parkir Makassar Raya. Jenis penelitian ini ialah kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai bagaimana penerapan inovasi sistem terminal parkir elektronik dilihat dari atribut inovasi.

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara. Dengan jumlah informan, 6 informan, 1 Direktur Operasional, 1 Kasabag Umum, 1 Pegawai PT KTI, 2 orang Daeng Parkir, dan 1 orang masyarakat.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk menyajikan data dari berbagai jawaban informan, penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PD Parkir Makassar Raya dibentuk melalui Peraturan Daerah Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sebelum pembentukan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, perpustakaan di kota Makassar dikelola oleh Badan Pengawas Perpustakaan (BPP) dibawah struktur organisasi unit-unit Pelaksanaan Tetap Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sudah mulai efektif melaksanakan tugasnya pada tanggal 1 september 2000, yaitu setelah dilaksanakan pengangkatan tiga orang direksi. Pada awal pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dilakukan suatu kebijakan pengorganisasian unit kerja yang berada dibawah struktur organisasi Perusahaan Daerah Parkir, seperti mendata dan memberikan legalitas kepada 98 juru parkir. Jumlah juru parkir tersebut terus berkembang sehingga berjumlah 125 orang dalam waktu empat bulan pada awal operasinya, yaitu pada bulan September hingga Desember tahun 2000.

Badan pengawas bertugas mengawasi dan membina perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta. Fungsi dari badan pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut : (a) Merumuskan kebijaksanaan untuk perusahaan secara terarah dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang, (b) Meneliti dan mengevaluasi lebih lanjut atas laporan perhitungan usaha Perusahaan Daerah, (c) Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan kepegawaian Perusahaan daerah dan penghasilannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, (d) Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Visi PD Parkir Makassar Raya “Optimalisasi Pelayanan Perparkiran Yang Tertib, Aman, Nyaman, Terkendali Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia”

Misi PD Parkir Makassar Raya diantaranya adalah untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan ke dalam

5 misi utama sebagai berikut : (a) Membentuk sistem perparkiran untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan mengoptimalkan fungsi jalan, (b) Membentuk sumber daya manusia (SDM) perparkiran yang berkualitas dan professional, (c) Meningkatkan efisiensi perparkiran dengan fasilitas pendukung, (d) Meningkatkan dan mengembangkan fungsi satuan ruangan parkir (SRP) tepi jalan sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, (e) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari jasa parkir.

Tujuan PD Parkir Makassar Raya ada 2 tujuan dari PD Parkir Makassar Raya yaitu : (a) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran, (b) Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Direktur Utama mempunyai tugas : (a) Merencanakan kegiatan Perusahaan Daerah untuk jangka panjang, mengawasi dan mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang umum, termasuk pengelolaan keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan, (b) Merumuskan strategi Perusahaan Daerah dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam melaksanakan operasi Perusahaan Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi yang berusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik, (d) Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi perusahaan Daerah, (e) Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta menentukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku, (f) Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari sistem atau prosedur administrasi yang berlaku, (g) Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan keluar ke berbagai pertemuan, (h) Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi, Laporan Keuangan dan Operasi.

Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kesekretariatan. Direktur umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

(a) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum,

(b) Mengkoordinasikan dan mengandaikan kegiatan pengadaan dan

perlengkapan, (c) Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan, (d) Mengendalikan pendapat dari hasil penagihan baik dari tarif perparkiran maupun iuran usaha perparkiran. (e) Mengadakan kerjasama yang erat dengan Direktur Operasional dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan aterial yang dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan dalam bidang operasional, (f) Mengawasi penyusunan anggaran belanja/menetapkan modal kerja perusahaan, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih baik dan efektif bersama dengan Direktur lainnya.

Direktur Operasional Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya: (a) Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan, (b) Menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan kegiatan operasional atas persetujuan Direksi, (c) Merencanakan teknik-teknik pengeolaan dan kegiatan operasi yang lebih efisien, efektif, dan murah, (d) Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir pada unit-unit parkir dan pelataran parkir yang dikelola swasta, (e) Melaksanakan

pengendalian, pengawasan segala bentuk peralatan operasional dan peralatan kerja/alat pelindung diri milik Perusahaan Daerah, (f) Mengatur tata cara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan teknik operasional perparkiran.

Fungsi Tugas / Tanggung Jawab Kepala Bagian Umum: (a) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari Seksi Administrasi dan Kepegawaian, Seksi Perlengkapan serta Seksi Hukum dan Humas, (b) Menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum kerumahtanggaan kepegawaian serta perlengkapan kantor, (c) Mengkoordinir, memeriksa merawat, memperbaiki dan memelihara serta mengatur dan mengawasi penggunaan kendaraan Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan, (d) Melaksanakan perbaikan/pengadaan barang/materi dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan daerah. Mengadakan usaha pemeliharaan dan pengawasan peralatan dan bangunan kantor, (e) Mengendalikan semua barang dan peralatan yang menjadi milik perusahaan sesuai dengan kebutuhannya, (f) Menyimpan dan mendistribusikan tiap jenis barang kepada semua unit kerja sesuai dengan

keperluan setelah mendapat pengesahan, (g) Meneliti, mempelajari dan melaksanakan petunjuk perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku

Fungsi Tugas / Tanggung Jawab Seksi Administrasi Kepegawaian: (a) Membantu Kepala Bagian Umum dan PSDM dalam melaksanakan dan merumuskan langkah-langkah tiap kebijaksanaan Perusahaan dalam bidang kepegawaian, (b) Menangani pelaksanaan seleksi / rekrutment calon karyawan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan, (c) Melaksanakan fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam hal pengangkatan pengembangan pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja, (d) Menyelenggarakan Administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi/promosi, cuti pegawai, absensi, pensiun pegawai, (e) Mempersiapkan dan menyusun syarat-syarat dan kualifikasi calon pegawai yang dibutuhkan, (f) Menyelenggarakan seleksi calon pegawai serta mempersiapkan surat panggilan bagi calon pegawai yang memenuhi syarat, (g) Mengadakan koordinasi dengan

seksi-seksi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya, (h) Mengumpulkan / mengelola data pegawai untuk perencanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, (i) Mempersiapkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sekaligus pemberian sanksi atas pelanggaran, (j) Berusaha untuk tetap memelihara dan mempertahankan kinerja dan prestasi yang baik bagi para pegawai, (k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Umum.

Fungsi Tugas / Tanggung Jawab Seksi Anggaran: (a) Menghimpun semua data potensi perparkiran dan membuat laporan secara periodik, (b) Membuat perencanaan anggaran belanja PD. Parkir Makassar Raya dalam satu tahun, (c) Mengadakan Koordinasi dengan seksi-seksi lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, (d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) yaitu : (1) Parkir kendaraan pada tempatnya, (2) Pengguna datang ke mesin TPE terdekat, (3) Masukkan nomor kendaraan dan tekan $\sqrt{\quad}$, (4) Tekan yang gambar rumah untuk memilih jenis kendaraan, (5) Tekan + atau - untuk durasi parkir,

(6) Tekan $\sqrt{\quad}$ untuk melakukan konfirmasi, (7) Tempelkan uang elektronik anda, dan (8) Ambil tiket parkir.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : (a) Mewujudkan Perusahaan Daerah yang mampu memberikan pelayanan jasa perparkiran kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan, (b) Mengoptimalkan pendapatan dalam rangka upaya untuk menjadikan perusahaan daerah yang terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar, (c) Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi perparkiran, (d) Menertibkan kawasan-kawasan/areal perparkiran di seluruh Kota Makassar Raya menjadi lebih mana, nyaman dan memuaskan, (e) Melakukan penertiban juru parkir liar, (f) Memupuk dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga iptek baik di dalam maupun diluar negeri dalam rangka pengembangan organisasi perusda perparkiran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang

inovator (orang yang membuat inovasi). Kata inovasi juga dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dalam pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) atau mesin parkir merupakan program pembaruan dari pemerintah dan PD. Parkir Makassar Raya yang membuat inovasi terbaru dengan menggunakan suatu alat atau mesin pembayaran parkir yang terbaru yang berbasis teknologi sudah banyak dilaksanakan oleh kota-kota di dunia dan merupakan solusi terbaik. Sejak dari dulu mesin parkir sudah telah menjadi andalan untuk mengolektifkan retribusi dan mendidik masyarakat untuk disiplin dalam perparkiran dan penggunaan sistem terminal parkir elektronik (TPE) ini merupakan yang pertama di Inonesia Timur. Dengan menggunakan kartu non tunai maka memakai uang e-toll masyarakat bisa memanfaatkan alat tatau mesin tersebut.

Keuntungan Relatif

Keuntungan relatif adalah sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dari

produk yang digantikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, keuntungan relatif dari program sistem terminal parkir (TPE) adalah perparkiran yang modern dan canggih dengan menggunakan alat teknologi yang dari *swiss*. Dengan adanya alat ini tarifnya sudah terkontrol sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi untuk membayar karena arah uangnya sudah jelas. Daeng parkir atau juru parkir tidak bisa lagi menaikkan harga parkir dan untuk menghindari terjadinya pungutan liar.

Kesesusaian

Kesesusaian merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi inovasi tersebut agar dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi yang baru, antara perparkiran sebelumnya juga harus disesuaikan untuk perpindahan perparkiran dari konvensional sekarang menjadi perparkiran teknologi yang menggunakan alata atau mesin, dalam hal ini alat atau mesin yang terpasang di 3 ruas jalan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena di tempat atau toko yang berada di 3 ruas jalan tersebut tidak mempunyai lahan parkir dengan adanya program ini maka pemerintah menyediakan lahan parkir di

pinggir jalan dan masyarakat bisa memarkirkan kendaraannya yang rapi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat yang bisa menyebabkan kemacetan.

Kerumitan

Kerumitan merupakan tingkat dimana suatu inovasi mempunyai kendala atau masalah yang sulit untuk dimengerti, dipahami dan digunakan lagi bagi masyarakat atau penerima. Dengan demikian, kerumitan dari inovasi program sistem terminal parkir elektronik (TPE) adalah mengenai juru parkir yang menolak awal adanya alat atau mesin TPE ini dan ada juga sebagian masyarakat yang komplain dengan tarif perjam lima ribu untuk mobil dan tiga ribu untuk motor walau hanya sebentar parkir, alat TPE ini bagus, canggi dan modern akan tetapi rata-rata yang menjadi kendala atau masalah di masyarakat bukan kepada alatnya tapi kepada tarifnya yang tinggi.

Kemungkinan Dicoba

Kemungkinan dicoba dari program sistem terminal parkir elektronik (TPE) adalah sudah dilakukan uji coba sebelumnya dan pemerintah memilih 3 ruas jalan tersebut dengan melalui survai awal dan yang sangat potensi,

alat TPE ini merupakan barang baru masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan itu sebelum resmi diuji coba dan disosialisasikan kepada masyarakat, setelah diresmikan oleh bapak walikota maka inovasi ini sudah mulai berjalan sampai sekarang.

Kemudahan diamati

Inovasi dapat dilihat dan diterima oleh masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudian dilakukan pengamatan dari suatu inovasi yang dapat diterima oleh masyarakat. PD. Parkir Makassar Raya adalah masyarakat sudah merasakan sendiri dari hasil dari penerapan program sistem terminal parkir elektronik (TPE) ini karena sebelum parkir masyarakat sudah ditanya terlebih dahulu bahwa ini parkir menggunakan alat atau mesin teknologi sehingga masyarakat bisa memahami, keamanan kendaraan, dan sudah ada tempat parkir dan tidak membuat kemacetan, sehingga banyak masyarakat juga yang memarkirkan kendaraannya di depan alat atau mesin TPE ini.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai Inovasi Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Makassar, penulis menarik kesimpulan yaitu koordinasi dalam

penerepan inovasi sistem terminal parkir elektronik (TPE) merujuk pada 5 indikator yaitu : (1) Keuntungan Relatif, di dalam penerapan inovasi TPE dengan adanya alat tersebut pembayaran yang dilakukan sudah terkontrol sehingga tidak adanya pungli yang dilakaukan oleh jukir atau daeng parkir, alat yang lebih modern dan membuat masyarakat lebih aman memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah di sediakan oleh PD Parkir Makassar Raya. (2) Kesusuaian, di dalam penerapan inovasi TPE yang dilakaukan untuk bisa menyesuaikan parkir yang dulu konvensional menjadi parkir elektronik yang memakai alat, perparkiran konvensional hanya ada daeng parkir atau juru parkir tapi dengan adanya alat TPE maka juru parkir akan di awasi oleh pegawai dari PT KTI dan masyarakat juga bisat menyesuaikan perparkiran yang telah ditentukan oleh PD Parkir Makassar Raya. (3) Kerumitan, adapun yang menjadi kerumitan dalam penerapan inovasi TPE ini yaitu masih ada sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan menggunakan alat ini karena harga perjam untuk parkir terlalu masalah untuk mereka yang hanya sebentar parkir di tempat yang ada alat TPE yang telah di tentukan oleh PD Parkir Makassar Raya. (4) Kemungkinan

dicoba, uji coba yang dilakukan selama dua minggu dengan menggunakan perparkiran alat TPE sebelum diresmikan oleh Pemerintah Kota Makassar dan PD Parkir Makassar Raya, masyarakat merasa aman parkir lagi di bahu jalan tidak merasa takut di gembok kendaraannya karena dengan adanya alat TPE ini yang dipasang di bahu jalan maka menjadi perparkiran yang resmi bukan parkir liar lagi. (5) Kemudahan diamati, setelah dengan adanya alat TPE maka masyarakat masih ada juga yang komplain atau tidak setuju, karena sebuah inovasi atau alat baru maka tidak semua masyarakat bisa menerima dengan langsung adanya perparkiran berbasis alat TPE sehingga yang membuat inovasi ini belum berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djameludin. 2012. *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. Erlangga: Jakarta.
- Hartono, D.U. dan Mulyonto E. 2010. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web*. Jurnal Teknologi Informasi. Volume 6. No. 1.
- Holle, Erick S. 2011. *Pelayanan Publik Melalui Elecktronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*. Jurnal Sasi. Volume 17. No. 1.

- Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, 131, CV Citra Malang.
- Moenir, A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Jatim: Bayumedia Publising.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Saenab. 2017. *“Inovasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Program Home Care (Dottorotta) Di Kota Makassar”*. Tesis (Makassar: Jurusan Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin).
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi Di Sektor Publik*. STIA-LAN Press: Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.